

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH,
KEBIJAKAN PUBLIK, DAN KESEMPATAN KERJA SEKTORAL
DI JAWA TIMUR**

Khusnul Ashar

Supartono

Setyo Tri Wahyudi

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

ABSTRACT

This research tries to reach 2 points: the relationship between public policy and employment in East Java, and the contribution to government economic policy in East Java. The research found that the East Java economic development has been more supported by foreign capital than by domestic one. The employment elasticity is high means that capital ploughed in investment created significant increase in employment. The leading sectors in East Java economy were Industry, trade and agriculture.

Keywords: *Public Policy, government policy, Investment, Employment*

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih merupakan fenomena sosial-ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan. Berdasarkan perhitungan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dari 37,3 juta jiwa pada tahun 2003 (16,6% dari total penduduk Indonesia tahun tersebut) menjadi 42,8 juta jiwa pada tahun 2004 (20% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 214 juta jiwa) [BPS, 2004]. Angka pengangguran terbuka sampai dengan bulan Februari 2006 masih cukup tinggi, yaitu 10,4 % yang berarti masih sekitar 10 juta orang angkatan kerja belum mempunyai mata pencaharian sama sekali (BPS, 2006). Untuk pengangguran terselubung jumlahnya diperkirakan di atas 60 juta orang angkatan kerja.

Kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sehubungan dengan masalah pengangguran dan rendahnya pendapatan pada hakikatnya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan berupa penetapan Upah Minimum Regional (UMR) jelas merupakan intervensi politis terhadap mekanisme pasar kerja yang bertujuan memperbaiki tingkat penghasilan kaum buruh. Sedangkan upaya menarik investor lebih banyak dari pemodal domestik maupun asing merupakan ikhtiar pengambil kebijakan dalam memperluas kesempatan kerja dan menurunkan angka pengangguran.

Dewasa ini, era reformasi telah memunculkan pola pembangunan daerah melalui konsep Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang (UU) No. 22 tahun 199 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 32 tahun 2004 yang memberi kesempatan lebih luas bagi pemangku kepentingan lokal untuk melakukan upaya pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Salah satu yang menonjol dari UU No. 32 tersebut adalah distribusi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan prinsip tersebut, maka pemerintah provinsi, kabupaten/kota diberi wewenang oleh UU secara langsung sama halnya dengan pemerintah pusat. Untuk kabupaten/kota telah ditetapkan 16 kewenangan, yang antara lain meliputi: Pekerjaan Umum (PU), Kesehatan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi, Tenaga Kerja, dan Penanaman Modal.

Otonomi daerah juga menempatkan posisi pemerintah daerah sebagai pihak yang ikut menentukan besaran Upah Minimum Regional (UMR). Manning (2002) menyatakan bahwa dengan adanya gerakan

reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah, UMR sudah menjadi isu penting dalam kebijakan sosial di Indonesia. Pada era reformasi ini, baik serikat buruh maupun Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja yang menderita pada saat krisis ekonomi berlangsung.

Dari kondisi tersebut, pertanyaan yang penting untuk memperoleh jawaban adalah bagaimana hubungan antara pembangunan ekonomi daerah, kebijakan publik, dan kesempatan kerja sektoral di Jawa Timur. Secara spesifik, adakah hubungan yang nyata antara pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan Otoda dan UMR dengan perluasan kesempatan kerja sektoral. Sektor-sektor ekonomi mana yang bisa tumbuh dengan pesat setelah adanya kebijakan publik tersebut. Sektor-sektor ekonomi mana yang paling responsif dan mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran?

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini bisa dilihat dari sisi teoritis maupun dari segi praktis. Pada tataran teoritis, penelitian mengenai hubungan antara kebijakan publik dan kesempatan kerja di wilayah kabupaten/kota Jawa Timur belum banyak dilakukan. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan referensi mengenai karakteristik ekonomi regional dan kontribusi wacana bagi konsep pembangunan ekonomi regional berbasis kebijakan publik. Pada tataran praktis, penelitian ini memberikan sumbangan berupa informasi kepada pemerintah daerah, khususnya para pengambil kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, dan ketenaga kerjaan. Manfaat hasil penelitian ini juga bisa diperoleh bagi pihak legislatif sebagai masukan dalam penyusunan prioritas pembangunan sektoral pada APBD.

B. KAJIAN TEORITIS

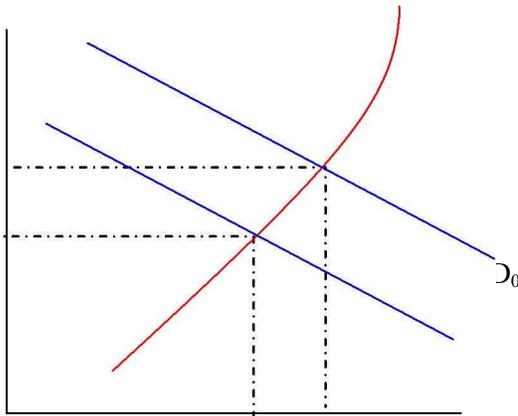
Pasar Tenaga Kerja Klasik

Aliran pemikiran klasik menganggap bahwa pasar tenaga kerja tiada bedanya dengan pasar barang. Apabila harga dari tenaga kerja, yaitu upah cukup fleksibel, maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Artinya, tidak ada kemungkinan muncul pengangguran sukarela.

Case dan Fair (2002:227), mengilustrasikan bahwa pandangan para ahli ekonomi klasik tentang pasar tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar 1. Para ahli klasik mengasumsikan tarif upah menyesuaikan diri untuk menyamakan jumlah tenaga kerja yang diminta dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, karena mengimplikasikan bahwa pengangguran tidak ada. Untuk melihat bagaimana penyesuaian itu berlangsung, andaikan ada perubahan yang menggeser kurva permintaan D_0 ke D_1 permintaan yang menurun itu, akan menyebabkan tingkat upah turun dari W_0 ke W^* dan jumlah tenaga kerja yang diminta jatuh dari L_0 ke L^* . Penurunan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan itu merupakan gerakan sepanjang kurva penawaran tenaga kerja.

Setiap titik pada kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan jumlah tenaga kerja yang ingin ditawarkan rumah tangga pada tingkat upah tertentu. Setiap keputusan rumah tangga tentang berapa banyak tenaga kerja yang harus ditawarkan merupakan bagian keseluruhan masalah pilihan konsumen rumah tangga. Setiap anggota rumah tangga melihat tingkat upah pasar, harga output, dan nilai waktu luang (termasuk nilai tinggal di rumah dan bekerja di lingkungan rumah atau membesarkan anak) dan memilih jumlah tenaga kerja untuk ditawarkan (jika ada). Seorang anggota rumah tangga yang bukan angkatan kerja menganggap waktunya dalam aktivitas non pasar lebih bernilai.

Sedangkan di setiap titik pada kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan jumlah tenaga kerja yang ingin dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pada tingkat upah tertentu. Setiap keputusan perusahaan mengenai banyaknya tenaga kerja yang diminta merupakan bagian dari keseluruhan keputusan maksimasi laba. Perusahaan menghasilkan laba dari penjualan output ke rumah tangga. Perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja, jika nilai output cukup untuk menutup upah yang di bayarkan. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan tergantung pada nilai output yang diproduksi oleh tenaga kerja.



Sumber: Case dan Fair, 2002:227

Gambar 1. Pasar Tenaga Kerja Klasik

Para ahli ekonomi klasik melihat cara kerja pasar tenaga kerja -perilaku penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja- sebagai optimal dilihat dari sudut pandang, baik rumah tangga individual dan perusahaan maupun dari sudut pandang masyarakat. Jika rumah tangga menginginkan lebih banyak output daripada yang diproduksi sekarang, permintaan output akan naik dan harga outputpun juga naik, permintaan tenaga kerja akan naik, tingkat upah akan naik dan lebih banyak pekerja yang akan ditarik ke dalam angkatan kerja (secara rasional beberapa dari mereka tidak tertarik masuk ke angkatan kerja pada tingkat upah yang rendah dan pastinya lebih tertarik untuk masuk ke angkatan kerja dengan tarif upah yang lebih tinggi).

Pada keseimbangan harga dan upah mencerminkan trade-off antara nilai yang diberikan oleh rumah tangga terhadap output dan nilai waktu yang dihabiskan untuk bersantai dan untuk pekerja non pasar. Selalu ada peluang kerja penuh (*full employment*) dalam arti itu. Para ahli ekonomi klasik yakin bahwa pasar akan mencapai hasil optimal jika diserahkan saja kepada skema mekanisme pasar, dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan.

Kesempatan Kerja dan Tingkat Upah

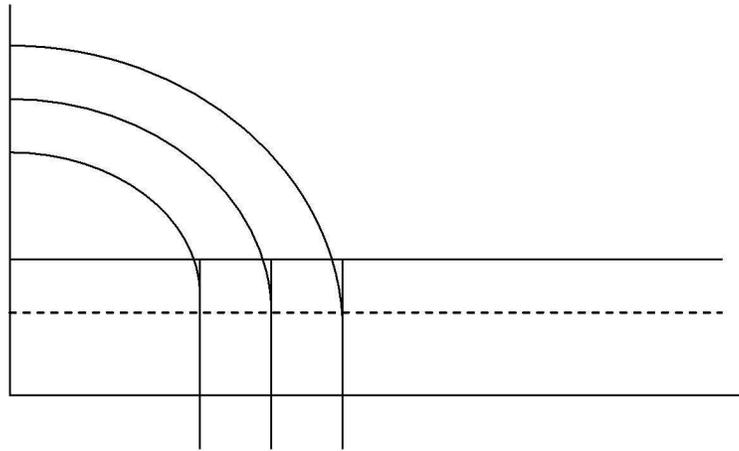
Terdapat dua teori penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaannya, yaitu hubungan antara pekerja (*employed*) dengan tingkat upah.

Teori Lewis

Lewis (dalam Todaro, 2000) mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja 1 sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis, sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja perdesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di perdesaan akan meningkat. Selanjutnya, peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak akan memberikan masalah justru merupakan modal mengakumulasi pendapatan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern dapat berjalan lancar, dan

perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak” (Jhingan, 2002:156-163). Lebih lanjut, Teori Lewis dapat dijelaskan dengan Gambar 2.



Gambar 2. Pembentukan Modal Dalam Menyerap Tenaga Kerja

OS menggambarkan upah subsisten rata-rata di sektor subsisten, dan OW adalah upah kapitalis. Pada saat upah di sektor kapitalis OW, penawaran buruh tidak terbatas sebagaimana ditunjukkan oleh kurva penawaran buruh yang horizontal WW. Mula-mula, waktu buruh ON_1 diperkerjakan di sektor kapitalis, produktivitas marginalnya adalah P_1Q_1 dan output total sektor ini adalah $OP_1Q_1N_1$. Dari output inilah dibayar upah yang sama dengan area OWQ_1N_1 . Area yang tersisa WP_1Q_1 menunjukkan output surplus. Inilah surplus kapitalis atau laba total yang dihasilkan oleh sektor kapitalis. Bilamana surplus ini diinvestasikan kembali, kurva produktivitas marginal berubah naik ke P_2Q_2 . Sekarang surplus kapitalis dan pekerjaan lebih besar daripada sebelumnya, masing-masing menjadi WP_2Q_2 dan ON_2 . Reinvestasi lebih lanjut menaikkan kurva produktivitas marginal dan tingkat pekerjaan ke P_3Q_3 dan ON_3 dan seterusnya, sampai seluruh buruh yang surplus diserap di sektor kapitalis. Setelah itu, kurva penawaran WW akan miring dari kiri ke kanan atau seperti penawaran biasa, dan upah serta pekerjaan akan terus naik bersama dengan adanya pembangunan.

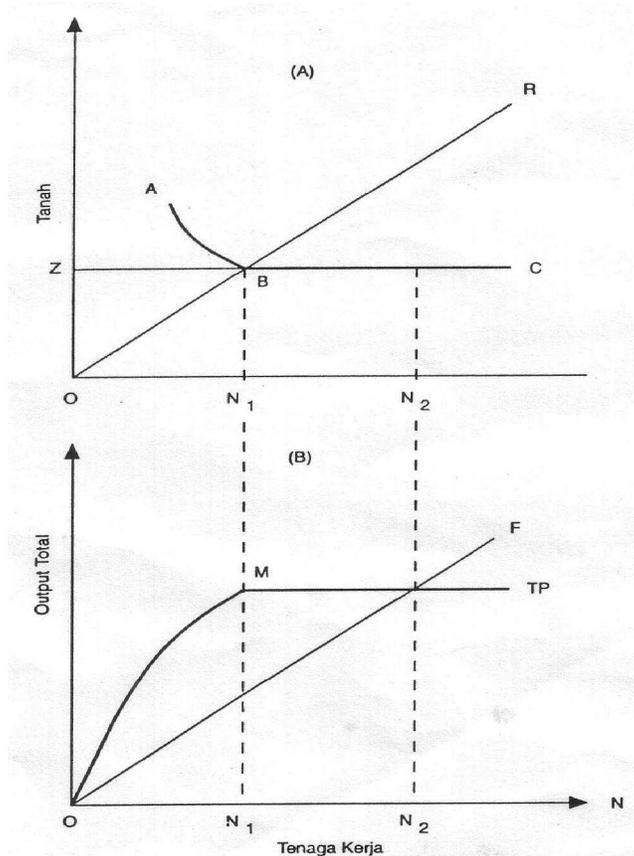
Teori Fei-Ranis

Teori yang dikemukakan oleh Fei-Ranis (1961; dalam Todaro, 2000) berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis (dalam Jhingan, 2002:218) ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. *Pertama*, di mana para pengangguran semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. *Kedua*, tahap di mana pekerja pertanian menambah output, tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dan dialihkan pula ke sektor industri. *Ketiga*, tahap yang ditandai dengan pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan penambahan output dan perluasan usahanya.

Pembangunan ekonomi timbul apabila para pekerja dialihkan dari sektor pertanian ke sektor industri melalui tiga tahap. Hal ini dilukiskan dalam Gambar 3 (A), (B), dan (C). Di mana panel (A) melukiskan sektor industri, (B) dan (C) sektor pertanian. Mulai dari panel C, di mana tenaga buruh di sektor pertanian diukur dari kiri ke kanan pada sumbu horizontal ON dan keluaran pertanian dari atas ke bawah pada sumbu vertikal OY. Kurva OCX adalah kurva produktivitas fisik total (TPP). CX

menunjukkan bahwa produktivitas marginal dari buruh MN adalah nol (0). Jadi, buruh MN surplus dan pemindahannya ke sektor industri tidak akan memengaruhi keluaran industri. Tetapi jika dianggap bahwa ke semua tenaga buruh ON bekerja di sektor pertanian, akan memproduksi keluaran NX. Misalkan seluruh NX tersebut dikonsumsi oleh seluruh tenaga kerja ON, upah nyatanya adalah sama dengan NX/ON atau slope dari garis OX. Inilah yang disebut sebagai upah institusional.

Proses pengalokasian dalam tiga tahap selama tinggal landas tersebut dilukiskan dalam panel (B) dari Gambar 4, di mana tenaga buruh keseluruhan diukur dari kanan ke kiri pada sumbu Horizontal ON dan keluaran rata-ratanya pada sumbu vertikal NV. Kurva NMRU menggambarkan produktivitas fisik



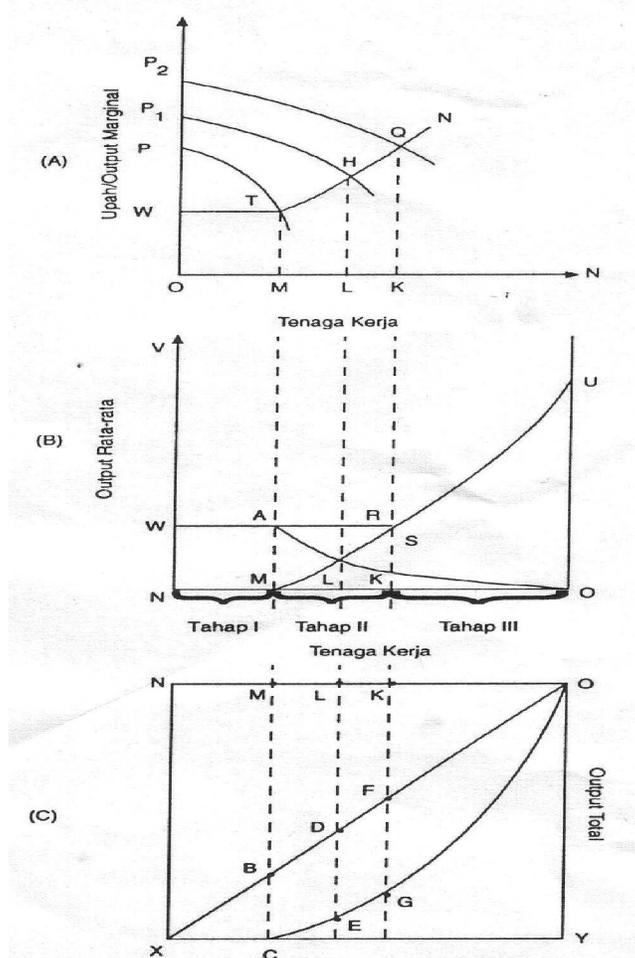
Gambar 3. Tahap Peralihan Sektor Pertanian Ke Industri

marginal (MPP) buruh dalam sektor pertanian. NW adalah upah institusional di mana buruh diperkerjakan dalam sektor ini.

Pada tahap I, pekerja MN merupakan penganggur tersamar, produktivitas fisik marginalnya nol, sebagaimana ditunjukkan oleh bagian NM dari kurva MPP dalam panel (B) atau bagian CX dari kurva TPP dalam panel (C). Tenaga kerja lebih sebesar NM ini dipindahkan ke sektor industri sebagaimana ditunjukkan pada OM dalam panel (A) pada tingkat upah institusional sama $OW (=NW)$.

Pada tahap II, MPP pekerja pertanian MK adalah positif dalam garis MR pada kurva MPP (NMRU) tetapi kurang dari upah institusional $KR (=NW)$, mereka memperoleh sebagaimana digambarkan dalam panel (B). Jadi, dalam batas tertentu mereka adalah penganggur tersamar juga dialihkan ke sektor industri. Tetapi upah nominal di sektor industri tersebut tidak akan menyamai upah institusional pada tahap ini. Hal ini disebabkan karena merosotnya keluaran pertanian akibat perpindahan tenaga kerja ke sektor industri tersebut. Hasilnya, terjadi kelangkaan mata-dagangan pertanian yang mengakibatkan naiknya harga, relatif dibanding barang-barang industri. Ini menyebabkan memburuknya syarat-syarat pada sektor industri, yang karenanya membutuhkan adanya suatu

kenaikkan upah minimal di sektor industri itu. Upah minimal tersebut naik lebih tinggi daripada upah institusional OW, ke LH dan KQ. Ini ditunjukkan oleh gerak naik kurva penawaran buruh dari WT ke H dan Q, pada saat buruh ML dan LK sedikit demi sedikit pindah ke sektor industri dalam panel (A). Gerakan kurva penawaran buruh WTW_1 dari T ke atas ini adalah “titik balik Lewis”.



Gambar 4. Proses Pengalokasian Sektor Pertanian Ke Industri

Pada tahap III bermula, pekerja pertanian mulai menghasilkan keluaran pertanian sama dengan upah institusional dan akhirnya tinggal landas dan awal dari pertumbuhan swasembada. Hal mana ditunjukkan oleh bagian RU dari kurva MPP pada panel B yang lebih tinggi daripada upah institusional KR (=NW). Akibatnya, buruh KO akan dialihkan dari sektor pertanian ke sektor industri pada upah nominal yang meningkat melebihi KQ pada panel (A). Hal ini akan menyedot kelebihan buruh di sektor pertanian yang sepenuhnya menjadi bersifat komersial. Menurut Fei-Renis, bahwa pengurusan buruh lebih harus ditafsirkan sebagai gejala pasar daripada sebagai kelangkaan tenaga kerja dalam arti fisik, ini diperlihatkan dengan kenaikan bidang upah nyata pada sumber penawaran.

Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana hubungan antara pembangunan ekonomi daerah, kebijakan publik, dan kesempatan kerja sektoral di Jawa Timur pada era desentralisasi dewasa ini. Secara spesifik penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk dan derajat hubungan antara kinerja pembangunan ekonomi dengan kesempatan kerja sektoral di Jawa Timur. Adakah hubungan yang signifikan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja di Jawa Timur setelah periode krisis ekonomi.
2. Mengidentifikasi bentuk dan derajat hubungan antara kebijakan UMR dan Penanaman modal dengan kinerja pembangunan ekonomi di Jawa Timur.
3. Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi mana di masing-masing Kabupaten-Kota di Jawa Timur yang bisa tumbuh dengan pesat setelah adanya kebijakan publik penetapan UMR dan Kebijakan penanaman modal. Sektor-sektor ekonomi mana yang paling responsif dan mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran pada masing-masing daerah?

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Unit Analisis dan Daerah Penelitian

Pada prinsipnya unit analisis penelitian ini adalah masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Timur selama periode setelah tahun 1997. Periode analisis setelah tahun 1997 dipilih karena merupakan periode pasca krisis ekonomi yang menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya proses recovery ekonomi nasional dan Jawa Timur.

Jenis Data dan Sumber Informasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh beberapa instansi/lembaga yang dianggap kompeten. Sumber informasi dan data berasal dari (1) Kantor Statistik Jawa Timur; (2) BAPPEPROP Jawa Timur; (3) Web-site Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan (4) Web-site masing-masing Pemerintah Kabupaten – Kota di Jawa Timur.

Metode Analisis dan Variabel Penelitian

Untuk mendeskripsikan pola hubungan antara perubahan kinerja pembangunan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi daerah dengan perubahan kesempatan kerja sektoral, dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk dan derajat hubungan antara kinerja pembangunan ekonomi dengan kesempatan kerja digunakan teknik analisis regresi linier dengan spesifikasi model:

$$E_{ij} = f(PDRB_j)$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} E_{ij} &= \text{Kesempatan Kerja pada Sektor } i \\ PDRB_j &= \text{PDRB Kabupaten-Kota } j \end{aligned}$$

Untuk itu model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini menjadi:

$$E_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 PDRB_j + e$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \text{Konstanta} \\ E_{ij} &= \text{Jumlah pekerja di sektor } i \text{ pada kab/kota } j \\ PDRB_j &= \text{Produk domestik regional Bruto pada kab/kota } j \text{ (dalam juta rupiah)} \\ e &= \text{Error variabel} \end{aligned}$$

2. Untuk mengidentifikasi bentuk dan derajat hubungan antara kinerja pembangunan ekonomi dengan kebijakan UMR dan Penanaman Modal digunakan teknik analisis regresi linier dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$PDRBi = f(C, W)_i$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} PDRBi &= PDRB \text{ Kabupaten-Kota}_i \\ Ci &= PMDN \text{ dan PMA di Kabupaten-Kota}_i \\ Wi &= UMR \text{ di Kabupaten-Kota}_i \end{aligned}$$

Untuk itu model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini menjadi:

$$PDRB_i = \alpha_0 + \alpha_1 C_i + \alpha_2 W_i + e$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} \hat{a} &= \text{Konstanta} \\ Ci &= \text{Nilai PMA dan PMDN pada kab/kota } i \\ Wi &= \text{Nilai UMR di Kabupaten-Kota}_i \\ e &= \text{Error variabel} \end{aligned}$$

3. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi mana yang paling responsif dalam mengatasi masalah pengangguran, pada masing-masing kabupaten kota dihitung derajat elastisitas kesempatan kerja sektoralnya dengan menggunakan alat analisis elastisitas kesempatan kerja sebagai berikut:

$$E_i = \frac{\% \text{ Pertumbuhan kesempatan kerja di sektor } i}{\% \text{ Pertumbuhan produksi di sektor } i}$$

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara PDRB dengan Penanaman Modal dan Upah Minimum

Uji statistik regresi menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas meliputi Nilai PMDN (X1), Nilai PMA (X2), dan Upah Minimum (X3), menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas tersebut ternyata hanya variabel Upah Minimum (X3) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sedangkan dua variabel bebas lainnya, Nilai PMDN (X1), Nilai PMA (X2), berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari hasil pengujian didapatkan estimasi model beserta seluruh koefisien dan nilai perkiraan sebagai berikut:

$$Y = -2379790 + 44.8 X1 + 86.79 X2 + 12.85 X3 + e$$

$$\begin{matrix} & (16.28) & (38.53) & (14.43) \\ R^2 = 0.460 & F = 9.372 \end{matrix}$$

Signifikansi dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat seperti ditunjukkan dalam model di atas, ditunjukkan dari nilai t statistik yang memperlihatkan bahwa variabel X1 dan X2 memberi pengaruh yang signifikan ($\text{sign} < 0.05$) terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan variabel X3 tidak signifikan terhadap PDRB, masing-masing memberikan pengaruh yang positif.

Kontribusi variabel PMDN dan PMA terhadap PDRB terlihat dari koefisien masing-masing variabel. Variabel PMA merupakan variabel paling dominan pengaruhnya terhadap PDRB (ditunjukkan dari nilai koefisien yang paling besar). Dari model tersebut, terlihat bahwa perubahan sebesar 1 satuan dari PMDN akan memberikan pengaruh perubahan PDRB sebesar 44,8. Sedangkan jika terjadi perubahan PMA sebesar 1 satuan pula, akan memberikan pengaruh terhadap PDRB sebesar 86,79.

Hal ini berarti bahwa pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan PDRB akan terjadi ketika terjadi peningkatan nilai investasi, dalam hal ini adalah PMA dan PMDN. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa perkembangan pertumbuhan PDRB suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi, dalam hal ini adanya PMDN dan PMA. Peningkatan PMDN dan PMA akan memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan PDRB suatu daerah.

Hubungan Antara PDRB Dengan Kesempatan Kerja Sektoral

Hubungan jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan di beberapa, yakni sektor A (Sektor Pertanian), sektor M (Sektor Pertambangan dan Galian; Sektor Industri; Sektor Listrik, Gas dan Air; dan Sektor Konstruksi), serta sektor S (Sektor Perdagangan, Sektor Komunikasi, Sektor Keuangan, dan sektor Jasa) terhadap PDRB menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.00000098 - 1000968 X1 - 794635 X2 - 879405 X3 + e$$

(757624.7) (719576.8) (748514.7)

$$R^2 = 0.181 \quad F = 2.433$$

Berdasarkan hasil tersebut, beberapa hal yang dapat dikatakan untuk menjelaskan pengaruh jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan di masing-masing sektor terhadap perkembangan PDRB suatu daerah adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan uji t statistik dan angka signifikansi, semua variabel (X1, X2, dan X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, hal ini terlihat dari nilai t statistik < t tabel atau sign > 0.05. Hal ini berarti bahwa, jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk masing-masing sektor (A, M, dan S) di masing-masing kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap tingkat PDRB.
- $R^2 = 0.181$ yang sangat rendah juga mengindikasikan bahwa penggunaan variabel presentase jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk menjelaskan PDRB sangat rendah.
- Secara umum, dapat dikatakan bahwa kenaikan ataupun penurunan jumlah tenaga kerja tidak memberikan pengaruh terhadap PDRB.

Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin besar PDRB suatu wilayah, maka semakin tinggi tingkat kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan untuk masing-masing kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2004 menunjukkan perubahan cukup signifikan.

Berdasarkan perhitungan di atas, laju pertumbuhan PDRB terbagi ke dalam tiga sektor, yakni sektor A (Sektor Pertanian), sektor M (Sektor Pertambangan dan Galian; Sektor Industri; Sektor Listrik, Gas dan Air; dan sektor Konstruksi), serta sektor S (Sektor Perdagangan, Sektor Komunikasi, Sektor Keuangan, dan Sektor Jasa). Laju pertumbuhan PDRB di sektor A (sektor Pertanian) menunjukkan laju pertumbuhan yang positif untuk masing-masing kabupaten/kota. Laju pertumbuhan terbesar dialami oleh Kabupaten Lumajang yang mencapai 24%, laju pertumbuhan terendah ditunjukkan oleh Kota Madiun dengan peningkatan laju pertumbuhan sebesar 3,44%. Di samping itu, juga terdapat daerah yang mengalami laju pertumbuhan yang negatif, yang berarti bahwa terjadi penurunan tingkat PDRB, yakni dialami oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, masing-masing sebesar -5,46% dan -6,98%.

Peningkatan laju pertumbuhan juga dialami oleh kabupaten/kota di sektor M (Sektor Pertambangan dan Galian; Sektor Industri; Sektor Listrik, Gas dan Air; dan Sektor Konstruksi). Meskipun laju pertumbuhan relatif rendah dibandingkan sektor pertanian, namun hampir semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan yang positif. Hal berbeda dialami oleh Kota Probolinggo yang mengalami pertumbuhan negatif mencapai -11,99%. Pertumbuhan sektor M tertinggi terjadi di Kabupaten Bangkalan (36,98 %) dan terendah terjadi pada Kabupaten Sampang (2,23 %).

Berbeda dari sektor A maupun sektor M, laju pertumbuhan PDRB yang besar terjadi di semua kabupaten/kota untuk sektor S (Sektor Perdagangan, Sektor Komunikasi, Sektor Keuangan, dan Sektor Jasa). Untuk sektor S, pertumbuhan tertinggi berada di Kabupaten Sidoarjo (27,49%) dan terendah terjadi pada Kabupaten Sumenep (6,50 %). Berdasarkan data, laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja laki-laki untuk masing-masing sektor (A, M, S) untuk tiap-tiap kabupaten/kota menunjukkan trend yang negatif. Hanya beberapa kabupaten/kota saja yang mengalami trend positif, di sektor A, Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan tenaga kerja laki-laki sebesar 35,55%, di Sektor S, Kota Mojokerto merupakan kota yang paling pesat laju pertumbuhannya, yakni mencapai 76.45 %. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh sektor M, yakni semua kabupaten/kota mengalami laju pertumbuhan yang negatif hingga mencapai -93,80 %.

Secara umum, perkembangan laju pertumbuhan tenaga kerja laki-laki untuk semua sektor menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif yang berarti bahwa selama kurun waktu 2000 dan 2004, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Berdasarkan data yang ada, laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan untuk masing-masing sektor (A, M, S) untuk tiap-tiap kabupaten/kota menunjukkan trend yang bervariasi. Sektor A (pertanian) menunjukkan laju pertumbuhan yang positif, hampir semua kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun demikian, juga terdapat daerah yang justru mengalami pertumbuhan negatif hampir mencapai 94%, yakni Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Hal yang sama juga terdapat di sektor M maupun sektor S, laju pertumbuhan menunjukkan tren yang negatif.

Secara umum, perkembangan laju pertumbuhan tenaga kerja perempuan untuk semua sektor menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif yang berarti bahwa selama kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2004 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja perempuan yang cukup besar. Berdasarkan data yang tersedia, laju pertumbuhan tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk semua sektor dan semua kabupaten/kota menunjukkan laju pertumbuhan tenaga kerja yang positif. Hal ini berarti bahwa selama kurun waktu 2000 dan 2004, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang cukup besar. Tren yang positif tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor.

Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral

Elastisitas menunjukkan seberapa besar perubahan suatu faktor memengaruhi faktor yang lain. Berdasarkan konteks di atas, elastisitas digunakan untuk melihat bagaimana perubahan laju pertumbuhan PDRB akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tenaga kerja. Nilai elastisitas terbagi ke dalam kategori: elastis ($e > 1$), inelastis ($e < 1$), dan uniter ($e = 1$). Berdasarkan perhitungan sebelumnya, elastisitas kesempatan kerja per sektor untuk masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan untuk masing-masing kelompok tenaga kerja: laki-laki, perempuan, serta laki-laki dan perempuan. Secara umum, terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan dari hasil perhitungan di atas:

- Tenaga kerja laki-laki dan perempuan

Elastisitas tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk masing-masing sektor di masing-masing kabupaten/kota juga menunjukkan angka yang elastis, bahkan jauh lebih dari 1. Hal ini berarti bahwa perubahan PDRB sekecil apapun akan berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Untuk sektor A, daya serap paling tinggi terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan berada pada Kabupaten Jombang (30,10); Kabupaten Tuban (25,28); Kabupaten Ngawi (18,68); Kabupaten Bangkalan (18,45); dan Kabupaten Pacitan (17,73).

Untuk sektor M, daya serap paling tinggi terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan berada pada Kabupaten Sampang (38,84); Kabupaten Kediri (14,60); Kota Kediri (11,55); Kota Madiun (7,89); dan Kabupaten Tulungagung (7,25).

Untuk sektor S, daya serap paling tinggi terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan berada pada Kabupaten Sumenep (14,22); Kabupaten Kediri (8,65); Kabupaten Pacitan (7,95); Kabupaten Trenggalek (7,57) dan Kabupaten Lumajang (7,45).

- Tenaga kerja laki-laki

Elastisitas kesempatan kerja untuk tenaga kerja laki-laki untuk masing-masing sektor di masing-masing kabupaten/kota secara umum menunjukkan nilai yang elastis ($e > 1$), hal ini berarti bahwa perubahan laju pertumbuhan PDRB yang kecil akan memberikan efek yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja laki-laki. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan nilai in elastis, yang berarti bahwa perubahan PDRB tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

- Tenaga kerja perempuan

Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh angka elastisitas kesempatan kerja untuk tenaga kerja perempuan, di mana elastisitas untuk masing-masing sektor di masing-masing kabupaten/kota secara umum menunjukkan nilai yang elastis ($e > 1$).

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kinerja pembangunan ekonomi Jawa Timur secara nyata dipengaruhi oleh penanaman modal dalam negeri maupun asing, di mana pengaruh PMA terhadap kinerja ekonomi Jatim relatif lebih besar daripada pengaruh PMDN. Kebijakan publik berupa penetapan UMK ternyata tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja ekonomi regional.
2. Elastisitas kesempatan kerja sektoral mengindikasikan bahwa untuk masing-masing sektor di kabupaten/kota menunjukkan bahwa perubahan PDRB sekecil apapun akan berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Untuk sektor A (Pertanian), daya serap paling tinggi terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan berada pada Kabupaten Jombang; Kabupaten Tuban; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Bangkalan; dan Kabupaten Pacitan. Untuk sektor M (yang didominasi oleh usaha Industri), daya serap paling tinggi terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan berada pada Kabupaten Sampang; Kabupaten Kediri; Kota Kediri; Kota Madiun; dan Kabupaten Tulungagung. Untuk sektor S (yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa), daya serap paling tinggi terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan berada pada Kabupaten Sumenep; Kabupaten Kediri; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Trenggalek; dan Kabupaten Lumajang.
3. Pendukung utama PDRB Jatim adalah sektor Industri kemudian diikuti oleh perdagangan dan kemudian baru sektor pertanian. Walaupun peranan sektor pertanian relatif lebih kecil dari pada sektor industri dan perdagangan, namun hampir separo dari seluruh angkatan kerja Jawa Timur (46,8 %) mencari nafkah dari sektor ini.

Rekomendasi

1. Kebijakan daerah harus ditujukan pada penciptaan iklim yang kondusif guna meningkatkan investasi baik PMA maupun PMDN
2. Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jatim, perlu kebijakan yang bisa mengembangkan investasi di sektor industri dan perdagangan. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran. Sektor-sektor ekonomi yang responsif terhadap penyerapan tenaga kerja hendaknya memperoleh prioritas dukungan.
3. Untuk membantu kelompok miskin, sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di wilayah Jawa Timur harus memperoleh perlindungan dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, G. 1987. *Increasing Minimum Wage: The Makro Economic Impacts*. Economic Policy Institute

Analisis Hubungan Antara Pembangunan Ekonomi
Azhar, Supartono dan Wahyudi

- Asian Development Bank. 2005. Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi Di Indonesia. *Economics And Research Department Development Indicators And Policy Research Division*. p. 1-16.
- Brown, Charles; Gilroy, Curtis dan Kohen, Andrew. 1982. The Effect Of Minimum Wage On Employment And Unemployment. *Journal Of Economic Literature*. June 1982. Pp 487-528.
- Dick, Fox dan Mackie. 1997. *Balanced Development East Java In The New Order. Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur Dalam Era Orde Baru*. PT Gramedia. Jakarta
- Dowrick, Steve dan Quiggin, John. 2003. A Survey Of The Literature On Minimum Wages. *Australian National University And University Of Queensland*. February 2003
- Freeman. 1996. The Minimum Wage As Redistributive Tool. *Economic Jurnal*. 106, 639-649
- Hendrani. 2002. *Good Governance In Minimum Wage Setting In The Era Of Regional Authonomy*. Smeru
- Islam dan Nazara. 2000. *Minimum Wage And The Welfare Of Indonesia Workers*. International Labor Organization. June. Jakarta
- Manning, Chris. 2002. *Minimum Wages: Social Policy Versus Economic Policy*, Nuning Ahmadi (ed). Smeru News : No 1 Jan–Maret 2000. p.1-4
- Nicholson, Walter. 2000. *Intermediate Mikroekonomics And Its Applicatian*. Eight Edition. Harcourt College Publisher. Bayu Mahendra dan Abdul Aziz (penerjemah). 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Edisi Kedelapan. PT Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rama, Martin 1996. The Cosequences Of Doubling The Minimum Wage: The Case Of Indonesia. *World bank policy research working paper* No. 1643. World Bank. Washington D. C.
- Widarti, Diah. 1984. *Hubungan Antara Sektor Service Dan Sektor Invormal Di Kota*. Dalam Zainal Bakir dan Chris Manning (Eds). *Angkatan Kerja Di Indonesia Partisipasi Kesempatan dan Pengangguran*. PT Rajawali. Jakarta.